

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kota Sibolga merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini terletak di pantai barat pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan teluk yang bernama Teluk Tapian Nauli, sekitar  $\pm$  350 km dari kota Medan. Dengan batas-batas wilayah: timur, selatan, utara pada kabupaten Tapanuli Tengah, dan barat dengan Samudera Hindia. Letak wilayah yang strategis menjadikan Kota Sibolga sangat cepat berkembang terutama sebagai tempat persinggahan para Pelaut. Pulau-pulau yang terhampar didepannya menjadi penyangga ombak dan gelombang dari Lautan lepas Samudera Hindia, sehingga membuat pelabuhan Sibolga lebih aman untuk berbagai aktifitas, khususnya aktifitas ekspor-impor.

Sejarah singkat nama Sibolga yakni berasal dari ketika orang Batak dari Silindung pertama-tama datang ke Teluk Tapian Nauli, dari kejauhan sebelum tiba di Teluk Tapian Nauli tampak jelas dihadapannya terbentang air (laut) yang luas. Orang Batak Silindung itu terheran-heran melihat air (laut) yang sedemikian luas. Tanpa disadari terucap kata-kata-kata kagum, *Balga.... Balga.... Balga nai....* Keheranan dan rasa kagum orang Batak Silindung itu sesuatu yang wajar saja, karena di daerahnya tidak terdapat air yang demikian luas. Besar.... Besar ... Besar sekali, demikian ucapnya. Tentu saja yang dimaksud dengan besar (luas) itu adalah lautan yang terlihat dihadapannya. Menurut etimologi kata Sibolga itu

dasar katanya, Si + balga menjadi Si + bolga, akibat pengaruh dialek pesisir maka menjadi Sibolga. Si adalah kata sandang yang diberikan kepada sesuatu yang dikagumi atau kepada seseorang yang dihormati. Akhirnya dibakukan menjadi Sibolga, akan tetapi orang pesisir juga sering menyebut *Sibogah* sedangkan dalam catatan sejarah Belanda disebut *Sie Bougah*.

Pada masa pemerintahan Belanda Siboga mengalami perkembangan sangat pesat, terutama setelah dijadikannya Sibolga menjadi Ibu Kota Keresidenan. Menurut Panggabean (1995 : 63) :

“Pantai Barat Sumatera termasuk pulau-pulau Nias, semuanya akan dimasukkan menjadi keresidenan Sibolga. Guna memenuhi kebutuhan tenaga pegawai yang berpengalaman dikeresidenan baru akan dimutasi karyawan terampil dari kantor pegawai kolonial di Air Bangis tanggal 7 Desember 1842 Sibolga secara resmi menjadi keresidenan”.

Setelah Sibolga ditetapkan menjadi Ibukota Keresidenan Tapanuli kota Sibolga pun dengan fungsinya untuk menampung kegiatan pemerintahan, perdagangan dan pelabuhan. Hanya beberapa tahun saja Sibolga berubah menjadi sentrum Tapanuli. Pelabuhanya menyedot banyak kapal niaga antar negaradan pula, ribuan saudagar dan jutaan manusia mengimpikan untuk tinggal di Sibolga. Sibolga menunjukkan peranannya di pantai barat Sumatera.

Sejak keluarnya Staadblad No. 496 Tahun 1906 status Tapanuli yang tadinya bagian dari Sumatera Barat beralih menjadi dibawah Gubernur Sumatera yang berkedudukan di Medan yang membagi wilayah Keresidenan Tapanuli dalam 5 afdeling, yaitu :

1. Afdeling Natal dan Batang Natal
2. Afdeling Sibolga dan Batang Toru

3. Afdeling Padangsidempuan

4. Afdeling Nias

5. Afdeling Tanah Batak

Afdeling Sibolga diperintah oleh seorang Contraleur dengan wilayah meliputi 13 Kakuriaan dan masing-masing dipimpin oleh Kepala Kuria. Pada saat itu Onder Afdeling Barus masih termasuk Afdeling Tanah Batak. Dengan keluarnya Staadblad No. 93 Tahun 1933 maka sebagian Onder Afdeling Barus digabung ke Afdeling Sibolga dan sebagian lagi masuk Afdeling dataran-dataran tinggi Toba. Selanjutnya dengan Staadblad No. 563 Tahun 1937 Onder Afdeling Barus keseluruhannya dimasukkan ke Afdeling Sibolga dimana berdasarkan Staadblad tersebut keresidenan-keresidenan Tapanuli dibagi atas 4 Afdeling, yaitu:

1. Afdeling Sibolga

2. Afdeling Nias

3. Afdeling Sedempuan

4. Afdeling Tanah Batak

Yang termasuk Afdeling Sibolga adalah :

1. Onder Distrik Sibolga

2. Onder Distrik Lumut

3. Onder Distrik Barus

Sedang Sorkam berada dalam lingkungan Onder Distrik Barus.

Pada kenyataannya, apa yang disebut Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah adalah pencerminan dari pembagian wilayah yang diatur dengan Staadblad No. 563 tahun 1937 tersebut diatas.

Pada jaman Jepang khususnya sistem pemerintahan Keresidenan Tapanuli lebih dititikberatkan pada strategi pertahanan misalnya Heiho, Gyugun, Kaygon Heiho dan badan-badan lainnya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, maka pada tanggal 15 Oktober 1945 oleh Gubernur Sumatera Utara Mr. T. Mohd. Hasan menyerahkan urusan pembentukan daerah otonom bawahan dan penyusunan pemerintah daerah kepada masing-masing Residen. Bahkan telah dipertegas lagi dengan PP No. 8 Tahun 1947 yang menjadi daerah otonom. Pada permulaan kemerdekaan, Residen Tapanuli Dr. Ferdinand Lumbantobing yang berkedudukan di Tarutung, dengan dasar telegram Gubernur Sumatera tanggal 12 Oktober 1945 tentang pembentukan Kepala-kepala Luha (Bupati) Sibolga. Selanjutnya pada bulan Juni 1946 melalui sidang Komite Nasional Daerah Keresidenan Tapanuli dibentuk Kabupaten Tanah Batak.

Khususnya untuk Kota Sibolga, dengan Surat Keputusan Gubernur pada tanggal 17 Mei 1946, kota Sibolga dijadikan kota administratif yang dipimpin oleh seorang Walikota yang pada saat itu dirangkap oleh Bupati Kabupaten Sibolga, maka pada tanggal 17 Nopember 1946 dibentuk sebuah Dewan Kota. Pada tahun 1946 di Tapanuli Tengah mulai dibentuk kecamatan-kecamatan untuk menggantikan Sistem Pemerintahan Onder Distrik Afdeling pada Pemerintahan Belanda. Kecamatan pertama sekali dibentuk ialah Kecamatan Sibolga kemudian

Lumut dan Barus. Sedangkan Kecamatan Sorkam ditetapkan kemudian berdasarkan Perintah Presiden Tapanuli pada tahun 1947. Kecamatan Sorkam dipisah dari Barus didasarkan kepada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap Kabupaten harus minimal mempunyai dua Kewedanaan sedang satu Kewedanaan minimal mempunyai dua kecamatan. Demikianlah sejarahnya maka Tapanuli Tengah mempunyai 4 kecamatan ketika itu. (Saat ini Kabupaten Tapanuli Tengah telah memiliki 15 kecamatan, yaitu : Kecamatan Manduamas, Kecamatan Sosor Gadong, Kecamatan Barus, Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Sirandorong, Kecamatan Sorkam Barat, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Kolang, Kecamatan Tapani Nauli, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Sibolga, Kecamatan Tukka, Kecamatan Lumut, Kecamatan Badiri, dan Kecamatan Sibabangun).

Pada masa Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi RIS dan Undang-Undang Sementara 1950, sistem pemerintahan yang ada tidak mengadakan perubahan atas bentuk dan batas-batas wilayah Tapanuli Tengah yang ada sebelumnya. Dengan Undang-Undang darurat No. 7 Tahun 1956, Sumatera Utara dibentuk Daerah Otonom Kabupaten, kecuali Kabupaten Dairi (yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4/1964). Salah satu kabupaten yang disebutkan dalam Undang-Undang Darurat tersebut ialah Tapanuli Tengah yang pada saat itu masih meliputi Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga sekarang ini. Tetapi dengan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar terbentuklah Kotapraja Sibolga yang pada saat ini dikenal sebagai Kota Sibolga.

Setelah Sibolga menjadi kotapraja, perkembangan Sibolga sangat signifikan dan menunjukkan karakteristik menjadi kota besar di Sumatera Utara, hal itu ditandai dari segi fisik dan non fisiknya. Dimana dari semenjak menjadi Kotapraja (1956) sampai sekarang perkembangannya dapat dilihat dari banyaknya bangunan-bangunan besar, gedung-gedung yang rapat dan juga didukung dengan laju pertumbuhan penduduknya yang dari tahun ke tahun semakin padat. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik unuk melakukan penelitian dengan judul “SEJARAH KOTA SIBOLGA DAN PERKEMBANGANNYA SETELAH KEMERDEKAAN (1945-2011)”

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Sejarah Kota Sibolga.
2. Kota Sibolga pada waktu penjajahan kolonial
3. Perkembangan Kota Sibolga pada masa kemerdekaan Indonesia
4. Sibolga menjadi Kotamadya Sibolga
5. Faktor-faktor yang menyebabkan Kota Sibolga menjadi kotamadya Sibolga

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sejarah munculnya Sibolga?
- b. Bagaimana kondisi pemerintahan, ekonomi dan pendidikan Sibolga pada masa kolonial?

- c. Bagaimana kondisi pemerintahan, ekonomi dan pendidikan di Sibolga Setelah Kemerdekaan?
- d. Apa yang melatarbelakangi kota Sibolga menjadi atau Kotamadya dan perkembangan kota Sibolga Setelah menjadi Kotamadya?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

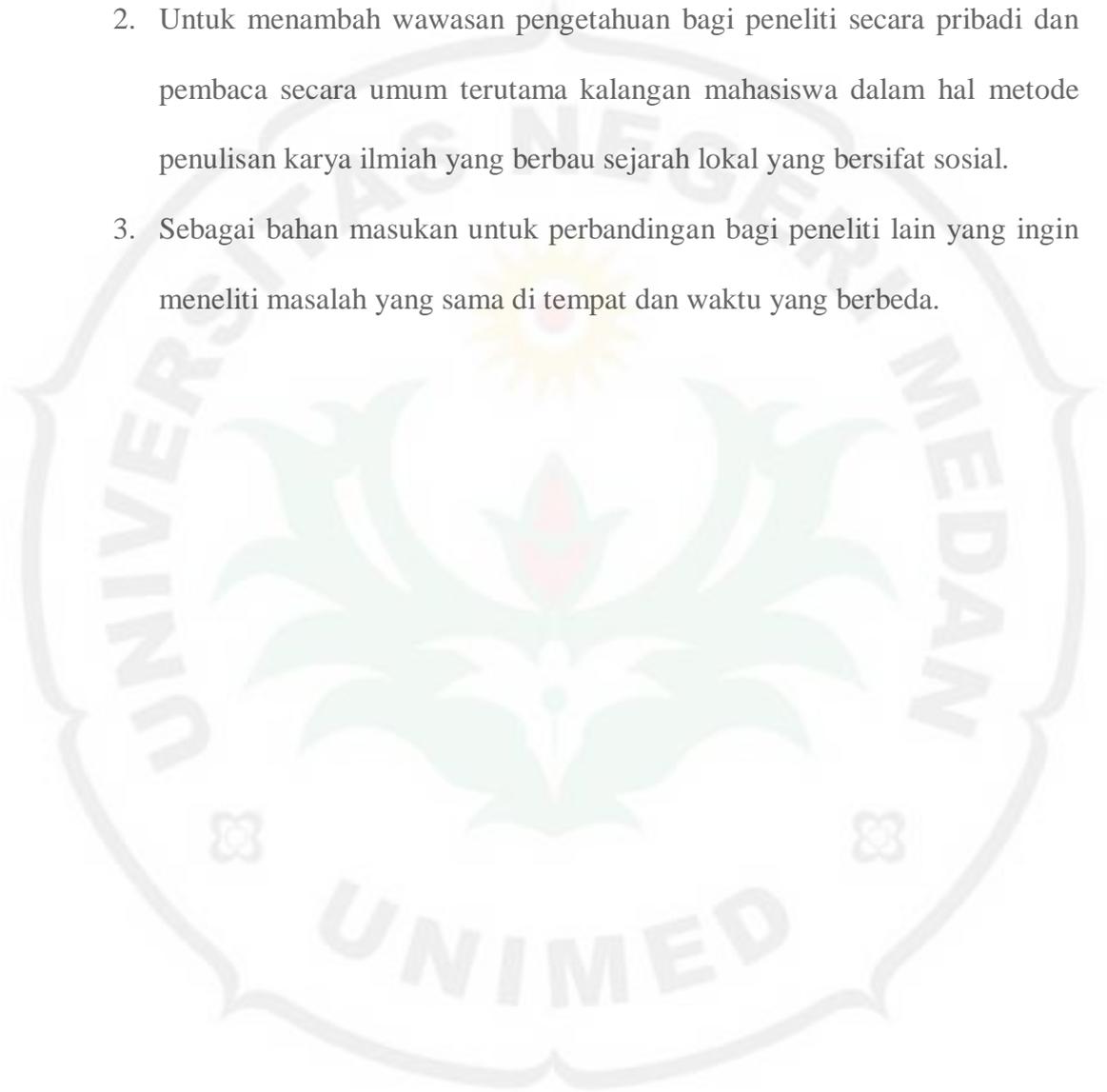
- a. Untuk mengetahui sejarah munculnya Sibolga.
- b. Untuk mengetahui kondisi pemerintahan, ekonomi dan pendidikan Sibolga pada masa kolonial.
- c. Untuk mengetahui kondisi pemerintahan, ekonomi dan pendidikan di Sibolga Setelah Kemerdekaan.
- d. Untuk mengetahui latar belakang kota Sibolga menjadi Kotamadya dan perkembangan kota Sibolga Setelah menjadi Kotamadya.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk memperkaya pengetahuan ataupun informasi bagi para pembaca baik dari kalangan mahasiswa / akademis maupun masyarakat umum mengenai sejarah perjalanan Kota Sibolga.

2. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti secara pribadi dan pembaca secara umum terutama kalangan mahasiswa dalam hal metode penulisan karya ilmiah yang berbau sejarah lokal yang bersifat sosial.
3. Sebagai bahan masukan untuk perbandingan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama di tempat dan waktu yang berbeda.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY